



Received 8th March 2021
Accepted 9th March 2021
Published 11st March 2021

Open Access

DOI: 10.35472/jsat.v5i1.426

Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung

Tetty Harahap ^{*a}

^a Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

* Corresponding E-mail: tetty.harahap@pwk.itera.ac.id

Abstract: *Unanticipated urban development is the beginning of the emergence of housing and settlement problems. In Indonesia, settlement problems are grouped into four types, namely the problem of housing backlogs, unlivable housing, slum settlements and illegal houses. When observed, the physical appearance of slum settlements and unlivable housing is not much different. The aim of this study is to identify the compatibility of indicators for slum settlements and livable housing. The unit of observation and analysis in this study is the fulfillment of the indicators of livable houses in the slum areas of Bandar Lampung City and the comparison of indicators of slum settlements and livable housing in Indonesia with several other countries (Malaysia, Korea, Australia, Canada, and the United Kingdom). The method used is deductive quantitative method and fisher exact test analysis techniques and indicator comparisons. The results of this study are (1) the insignificance of the relationship between the fulfillment of the indicators of livable houses and slums and (2) the Indicators of Livable Houses in several other countries (Malaysia, Korea, Australia, Canada, and the UK) and livable houses belonging to Indonesia. With this research, it is hoped that the indicators for determining slum settlements and habitable houses can be integrated so that the handling of settlement problems in Indonesia can be more effective and efficient.*

Keywords: *indicators of slum settlements, indicators of livable housing, Bandar Lampung City, Urban Development*

Abstrak: Perkembangan Kota yang tidak diantisipasi adalah awal dari munculnya permasalahan perumahan dan permukiman. Di Indonesia permasalahan permukiman dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu permasalahan *backlog* perumahan, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh dan rumah liar. Bila diobservasi, penampakan fisik permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni tidak jauh berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian indikator untuk permukiman kumuh dan rumah layak huni. Unit amatan dan analisis dalam penelitian ini adalah pemenuhan indikator rumah layak huni di permukiman kumuh Kota Bandar Lampung dan perbandingan indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni Indonesia dengan beberapa negara lain (Malaysia, Korea, Australia, Kanada, dan Inggris). Metode yang digunakan adalah metode deduktif kuantitatif dan teknik analisis uji fisher exact dan komparasi indikator. Hasil dari penelitian ini adalah (1) tidak signifikannya hubungan pemenuhan indikator rumah layak huni dan kekumuhan dan (2) Indikator Rumah Layak Huni beberapa negara lain (Malaysia, Korea, Australia, Kanada, dan Inggris). Indikator tersebut merupakan gabungan dari Indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Indikator penentuan permukiman kumuh dan rumah layak huni dapat diintegrasikan sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan permasalahan permukiman di Indonesia

Kata Kunci : *indikator permukiman kumuh, indikator rumah layak huni, Kota Bandar Lampung, perkembangan kota*

Pendahuluan

Permukiman dan perumahan adalah salah satu elemen pembentuk kota layak huni yang utama [1]. Sehingga pembahasan mengenai permukiman dan perumahan memiliki prioritas tinggi dalam mewujudkan kota layak huni. Dalam pembahasan permukiman, terdapat dua kondisi yang memungkinkan untuk terjadi. Kondisi pertama adalah pertumbuhan permukiman di kawasan

yang direncanakan dengan baik. Kondisi kedua adalah pertumbuhan permukiman di kawasan yang berkembang secara alami mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya.

Permasalahan dalam permukiman secara umum dapat dibagi menjadi empat, yaitu : permasalahan *backlog* perumahan, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, dan rumah liar. *Backlog* perumahan merupakan permasalahan dari segi kuantitas, rumah liar merupakan

pembahasan mengenai rumah yang berada di lahan dengan status ilegal, keduanya mempunyai indikator yang jelas. Sedangkan, permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni adalah dua hal yang hampir serupa. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai dua hal saja, yaitu rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh. Dua hal ini biasanya dibahas secara terpisah.

Kemiskinan dapat ditunjukkan dengan melihat karakteristik fisik rumah. Rumah tidak layak huni merupakan sasaran program rehab rumah dengan menilai pemenuhan indikator karakteristik fisik rumah[2]. Secara tidak langsung, dengan menggunakan data indikator kemiskinan (melihat fisik rumah) maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat.

Kajian dan kebijakan pada empat masalah permukiman yang telah dibahas sebelumnya dapat ditemui secara terpisah. Kajian dan Kebijakan tersebut telah ditangani oleh banyak pihak baik pemerintah, swasta maupun secara swadaya oleh masyarakat. Di Kota Bandar Lampung, terdapat beragam program, seperti Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan lain-lain. Program-program tersebut merupakan kebijakan untuk memberikan solusi atas permasalahan permukiman. Namun, belum ada kajian khusus mengenai permasalahan permukiman secara menyeluruh dan tersinkronisasi agar dapat dirumuskan kebijakan berdasarkan kondisi objektif permukiman di Kota Bandar Lampung. Studi ini adalah awalan untuk tujuan besar tersebut.

Permukiman kumuh, menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2018 [3], diindikasikan oleh :

1. Kondisi Bangunan Gedung (Ketidakteraturan bangunan; bangun hunian tidak sesuai persyaratan teknis)
2. Kondisi Jalan Lingkungan (Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang tidak layak)
3. Kondisi Jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum yang tidak memadai
4. Kondisi Penyediaan Air Minum (Tidak terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/orang/hari))
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah (Jamban Keluarga tidak sesuai persyaratan teknis; saluran pembuangan air limbah rumah tangga tidak terpisah dengan saluran drainase lingkungan

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan (Sampah Domestik rumah tangga di kawasan permukiman tidak terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu
7. Kondisi Proteksi Kebakaran : Kawasan Permukiman tidak memiliki sarana/prasarana proteksi kebakaran.

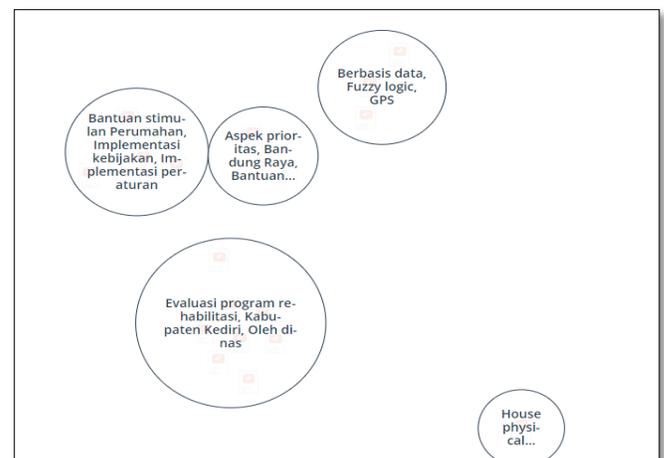
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memeneuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni[4].

Indikator suatu rumah dapat dikatakan rumah layak huni, yaitu :

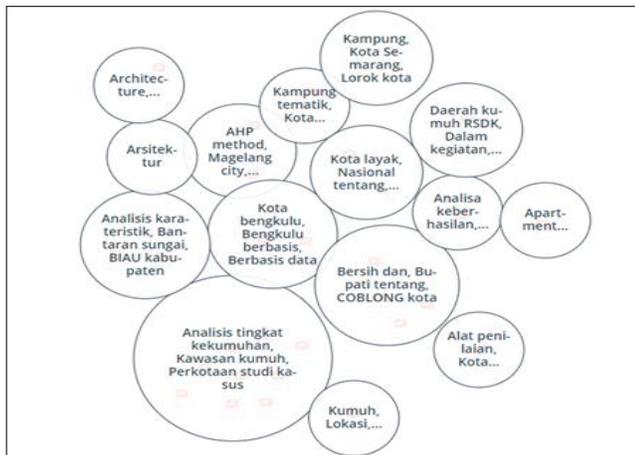
- a. Kebutuhan minimal masa (penampilan) dan Ruang(luar-dalam) (Kebutuhan Luas);
- b. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan;
- c. Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. [5]

Dikarenakan kondisi yang tidak mencapai standar minimal, di lapangan, pengertian kumuh dan tidak layak huni menjadi bias. Permukiman kumuh identik dengan kumpulan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni juga diasosiasikan sebagai permukiman kumuh.

Artikel ini membahas mengenai hubungan indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni dengan studi kasus di permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, kajian pemenuhan indikator rumah layak huni pada permukiman kumuh tersebut, serta komparasi indikator di beberapa negara.



Gambar 1. Overview riset mengenai rumah layak huni sumber : <https://openknowledgemaps.org/>



Gambar 2. Overview riset mengenai permukiman kumuh
sumber : <https://openknowledgemaps.org/>

Selayaknya program penanganan permukiman kumuh dan rumah tak layak huni dibuat terpisah, begitupun dengan penelitian mengenai kedua hal tersebut. Kajian mengenai permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni hampir tidak pernah digabungkan dalam satu artikel atau jurnal untuk kasus di Indonesia. *Overview* dari kumpulan riset dan artikel mengenai kedua hal tersebut digambarkan dalam gambar 1 dan 2.

Belum ada penelitian khusus mengenai *review* indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni di Indonesia. Kajian yang telah ada cenderung terpisah mengenai penggunaan masing-masing indikator untuk dinilai di berbagai lokasi penelitian. Untuk *review* indikator pun masih terpisah, misalnya kajian mengenai karakteristik rumah untuk identifikasi rumah tidak layak huni dalam lingkup ekonomi dan kependudukan [2]. Selain itu, ada juga penelitian mengenai indikator spasial khusus untuk menilai kelayak hunian di Kota Banjarmasin [6]. Sehingga penelitian ini akan mengisi celah (*gap*) penelitian mengenai *review* indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni.

Kemudian, penelitian ini diperkuat juga dengan uji statistik kasus di bandar lampung untuk hasil penelitian yang lebih mendalam. Kota Bandar Lampung dipilih karena merupakan kota yang memiliki indeks kota layak huni di bawah rata-rata nasional [1]. Dengan mengambil studi kasus di Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat memperdalam pembahasan kota layak huni melalui rumah layak huni dan permukiman kumuh. Pada dasarnya, apabila ditemukan titik temu atau persilangan indikator antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, pemerintah bisa lebih mengintegrasikan program-program penanganan yang telah ada. Oleh karena

itu, penelitian ini diperlukan untuk memberi masukan bagi efektivitas dan efisiensi kebijakan penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif Uji Fisher (*Fisher Exact Test*) dan komparasi.

Unit analisis dari penelitian ini adalah rumah yang ada di permukiman kumuh Kota Bandar Lampung untuk menjustifikasi kecenderungan indikator yang beririsan antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Unit Analisis kedua adalah indikator rumah layak huni di beberapa negara, yaitu: Australia, Korea, Malaysia, Kanada dan Inggris sebagai komparasi dari indikator rumah layak huni.

Untuk uji statistik dengan studi kasus Kota Bandar Lampung, populasi dalam penelitian ini adalah permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah sebaran sampel dalam penelitian ini dalam keseluruhan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung :

Tabel 1. Sebaran dan Luas Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Jumlah RT (Kumuh Berat)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Sampel
1.	Sukarame	44	98,6	-
2.	Sukabumi	13	137,58	-
3.	Rajabasa	8	204,46	-
4.	Tanjung Senang	1	100,97	-
5.	Tanjung Karang Timur	8	112,71	Sawah Brebes
6.	Tanjung Karang Barat	25	67,08	-
7.	Tanjung Karang Pusat	73	230,84	Pasir Gintung
8.	Panjang	30	233,38	Way Lunik
9.	Bumi Waras	36	189,12	Kangkung dan

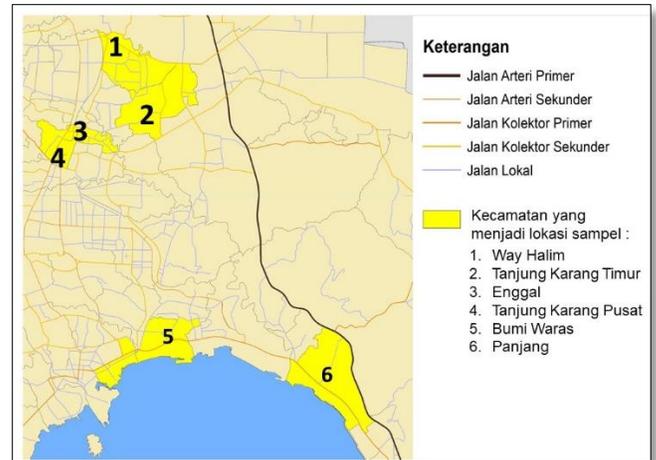
No	Kecamatan	Jumlah RT (Kumuh Berat)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Sampel
				Gunung Kunyi
10.	Kedamaian	6	118,99	-
11.	Teluk Betung Barat	18	94,95	-
12.	Teluk Betung Selatan	35	92,6	-
13.	Teluk Betung Utara	5	87,49	-
14.	Teluk Betung Timur	37	61,2	-
15.	Kemiling	111	366,3	-
16.	Enggal	3	40,75	Gunung Sari
17.	Way Halim	3	166	Jagabaya III, Gunung Sulah
18.	Kedaton	11	84,63	-

Sumber : Surat Keputusan walikota Bandar Lampung No. 406/324/III.24/HK/2016 dan peneliti (kolom sampel), 2019

Dari lokasi terpilih tersebut, terdapat 24 sampel rumah di permukiman kumuh Kota Bandar Lampung yang kemudian datanya digunakan dalam penelitian ini. Sebaran diambil pada Pusat Pelayanan Kota Bandar Lampung (Kawasan Tanjung Karang dan Panjang) serta Pusat Kota Bandar Lampung terdahulu (Kawasan Teluk Betung). Analisis dilakukan dengan melihat tingkat kekumuhan lokasi penelitian dan pemenuhan indikator rumah layak huni di lokasi tersebut. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Data diproses dengan program IBM SPSS 26.

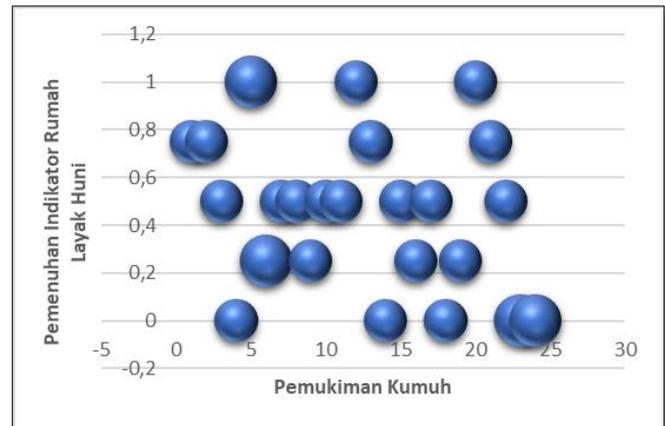
Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, dua kelompok/klasifikasi dalam pembahasan permukiman telah dianalisis, yaitu permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Dengan demikian, terlihat hubungan kawasan permukiman yang telah diobservasi pemenuhan indikator rumah layak huni dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/324/III.24/HK/2016 dengan status perumahan dan permukiman kumuh[7].



Gambar 3. Peta sebaran permukiman kumuh dalam penelitian

Tahap awal dari analisis data dari penelitian ini adalah memproses data menjadi grafik scatter sebagai berikut :



Gambar 4. Grafik Scatter Hubungan Permukiman Kumuh dan Pemenuhan Indikator Rumah Layak Huni

Dari Grafik di atas terlihat bahwa data tersebar dan terindikasi tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Untuk lebih menegaskan, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk data yang sudah didapat di Kota Bandar Lampung dengan teknik *fisher exact test*, yakni sebagai berikut :

Count	Pemenuhan Indikator Layak Huni					Total	
	0	16,7	33,3	50,0	66,7		100,0
Tingkat Kekumuhan Kumuh Sedang	2	1	4	4	7	2	20
Tingkat Kekumuhan Kumuh Berat	2	0	1	0	0	1	4
Total	4	1	5	4	7	3	24

Gambar 5. Tabel Frekuensi Data antara tingkat kekumuhan permukiman dan pemenuhan indikator rumah layak huni

Chi-Square Tests						
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	6.240 ^a	5	.284	.363		
Likelihood Ratio	7.259	5	.202	.306		
Fisher-Exact Test	5.975			.236		
Linear-by-Linear Association	1.076 ^b	1	.300	.315	.171	.050
N of Valid Cases	24					

a. 11 cells (91.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.
b. The standardized statistic is -1.037.

Gambar 6. Hasil Signifikansi dengan Uji Fisher Exact

Dari hasil analisis data melalui SPSS di atas, terlihat bahwa nilai p adalah 0.236, sehingga $p > \alpha$ (0,05). Hasil ini memberikan arti hipotesis ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan antara permukiman kumuh dan pemenuhan indikator rumah layak huni. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa memang permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni adalah berbeda. Konsekuensinya, implementasi penanganan dilakukan terpisah untuk keduanya. Hal ini kemudian yang menjadi dasar untuk lebih memperdalam ketepatan indikator yang digunakan mengenai dua hal tersebut.

Untuk memperdalam pembahasan mengenai pemenuhan indikator rumah layak huni dengan studi kasus Kota Bandar Lampung ini, perlu dibandingkan indikator layak huni bagi permukiman di Indonesia dan studi kasus di negara lain.

a. Indonesia

Indikator permukiman kumuh di Indonesia, terorientasikan dengan dominasi infrastruktur dasar permukiman.

Tabel 2. Orientasi Indikator Permukiman Kumuh

No	Indikator Kumuh	Orientasi
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Internal Rumah
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Infrastruktur Pendukung
3.	Kondisi Jaringan drainase	Infrastruktur Pendukung
4.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Infrastruktur Pendukung
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Infrastruktur Pendukung
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Infrastruktur Pendukung
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Infrastruktur Pendukung

Sumber : Analisis Peneliti, 2021

Sedangkan untuk indikator rumah layak huni, fokusnya adalah bagaimana kondisi di dalam rumah tersebut (Internal Rumah).

Tabel 3. Orientasi Indikator Rumah Layak Huni

No.	Indikator Layak Huni	Orientasi
1.	Kebutuhan minimal masa (penampilan) dan Ruang(luar-dalam) (Kebutuhan Luas)	Internal Rumah

No.	Indikator Layak Huni	Orientasi
2.	Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan	Internal Rumah
3.	Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan	Internal Rumah

Sumber : Analisis Peneliti, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indonesia melakukan pemisahan indikator permukiman dan rumah layak huni, padahal ada indikator yang beririsan, yaitu pada bagian kondisi bangunan gedung dan semua indikator pada rumah layak huni.

b. Australia :

Tabel 4. The Landcom Universal Housing Design Guidelines, Bringolf, 2011

No	Standar Layak Huni
1.	Akses langsung ke rumah
2.	Ruang untuk parkir mobil
3.	Pintu depan yang lebar
4.	Pintu di dalam rumah yang lebar
5.	Koridor yang lebar
6.	Fasilitas utama rumah terletak di lantai dasar
7.	Ruang untuk sirkulasi di ruang tamu
8.	Ruang di kamar tidur
9.	Desain di kamar mandi untuk kemudahan dan penggunaan yang mandiri (antisipasi pengguna golongan disabilitas)
10.	Ruang yang cukup untuk di dapur
11.	Ruangan yang cukup untuk ruang laundry
12.	Kusen jendela yang rendah

Sumber : The Landcom Universal Housing Design Guidelines, Bringolf, 2011[9]

Australia membuat indikator rumah layak huni tidak hanya untuk dalam rumah akan tetapi juga termasuk akses dan ruangan tambahan misalnya untuk parkir mobil.

c. Korea Selatan

Standar minimum rumah di Korea meliputi standar kamar tidur, standar fasilitas rumah, standar ruang dalam satu lantai, dan standar lingkungan [10]. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Rumah Layak Huni di Korea Selatan

No	Elemen yang diatur	Standar Layak Huni
1.	Standar Kamar Tidur	Terdapat batasan berdasarkan pernikahan, anak-anak, dan jenis kelamin
2.	Standar Fasilitas Rumah	- Terdapat pengaturan mengenai dapur pribadi - Kamar mandi berstandar dan hanya untuk penghuni rumah tersebut

No	Elemen yang diatur	Standar Layak Huni
		- Kamar mandi dengan air hangat dan dingin - Setiap rumah tangga memiliki fasilitas layanan air bersih
3.	Standar Ruang	- Ada aturan luas kamar sesuai jumlah pengguna - Ada luas dapur minimal sesuai pengguna

Sumber : Shin Ae et al, 2007[10]

d. Kanada

Tabel 6. Indikator Rumah Layak Huni di Kanada

No	Elemen yang diatur	Standar Layak Huni
1.	Lokasi Perumahan	Lokasi perumahan harus berada pada struktur yang kokoo, tahan air, angin dan perubahan kondisi cuaca
2.	Peralatan dan perabotan	Penghuni rumah harus diberikan pemanas yang cukup, air minum, kamar mandi dan ruangan yang cukup untuk tidur
3.	Sanitasi	Semua ruangan termasuk area bersama harus selalu bersih

Sumber : Government of Alberta, 2012[11]

Kanada mensyaratkan rumah untuk lengkap dengan perabotan dan terawat kebersihannya, namun juga memasukkan faktor lokasi dari rumah tersebut.

e. Malaysia

khusus malayasia, pengaturan rumah layak huni diberikan untuk pekerja. Implikasinya, pengaturan difokuskan untuk ruang kamar bagi para pekerja.

Tabel 7. Indikator Rumah Layak Huni di Malaysia

No	Elemen yang diatur	Standar Layak Huni
1.	Ruangan	- Harus ada satu ruang istirahat, ruang makan, kamar tidur, dapur dengan penerangan dan sirkulasi udara yang cukup - Kamar mandi dan atau toilet dengan penerangan yang cukup. Rasio pengguna : 1 kamar mandi untuk 6 orang apabila tidak di mess dan satu kamar mandi untuk 15 orang bila berada di mess pekerja
2.	Tempat menggantung/menjemur pakaian	Ada satu area untuk menggantung/menjemur pakaian
3.	P3K dan tempat sampah	Harus ada minimal satu set P3K dan tempat sampah

Sumber : Workers Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990 (Act 446) [12]

f. Inggris

Inggris memiliki pengaturan paling lengkap dari negara-negara sebelumnya. Dengan kelengkapan indikator ini, Inggris memungkinkan untuk menjadi contoh apabila akan melakukan peninjauan indikator.

Tabel 8. Indikator Rumah Layak Huni di Inggris

No	Element yang diatur	Standar Layak Huni
1.	Aksesibilitas	Eksternal Rumah : Harus ada rute sirkulasi komunal, parkir mobil, pintu gerbang bersama/komunal, tangga dan lift bersama/komunal Internal Rumah : Ada pengaturan mengenai pintu, lantai, undakan, dan ruangan yang harus ada di rumah, termasuk halaman rumah pribadi
2.	Ruangan	Ada pengaturan kamar, jumlah kamar, luas kamar, dan langit-langit
3.	Kemamanan Lokal	Pengaturan pintu, jendela, garasi, penerangan, dan penyimpanan sepeda yang harus aman
4.	Efisiensi Air	Rumah harus memiliki pengaturan untuk efisiensi penggunaan air untuk setiap kebutuhan rumah tangga
5.	Energi	Menyesuaikan dengan pendekatan regulasi gedung setempat.

Sumber : Housing Standards Review By Department Communities And Local Government UK (2013) [13]

Dari data di atas, didapatkan bahwa kelima negara tersebut memiliki indikator standar minimal layak huni dengan berorientasi kondisi internal sekaligus eksternal rumah. Rumah tidak hanya dipandang sebagai bangunan untuk tinggal saja, namun perlu dilengkapi fasilitasnya agar dapat dihuni dengan baik. Dengan kata lain, permasalahan jaringan sirkulasi, air bersih dan energi juga harus menjadi perhatian dalam indikator rumah layak huni. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tabel Komparasi Indikator Rumah Layak Huni

Indikator Rumah Tidak Layak Huni	Indonesia	Australia	Korea Selatan	Kanada	Malaysia	Inggris
Internal Rumah	√	√	√	√	√	√
Eksternal Rumah (Infrastruktur Pendukung)	Dimasukkan ke indikator permukiman kumuh	√	√	√	-	√

Sumber : Analisis Peneliti, 2021

Solusi untuk menangani permukiman kumuh, lebih baik dengan tidak direlokasi [14]. Dengan kata lain, permukiman

dibuat layak huni dengan meningkatkan kualitas rumah, infrastruktur dasar dan memberikan akses pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Jika kita membandingkan dari standar rumah layak huni beberapa negara di atas, terlihat bahwa pemenuhan indikator tidak hanya mengenai unit rumah saja, tetapi juga memuat infrastruktur (prasarana, sarana dan utilitas) penunjang rumah tersebut dan sekitarnya. Dengan kata lain, apabila ingin menyelesaikan permukiman kumuh, maka permasalahan rumah tidak layak huni juga akan terselesaikan.

Bila dibandingkan antara indikator di Indonesia dan kelima negara tersebut, terdapat perbedaan orientasi rumah layak huni sehingga akan sulit menemukan keterkaitan pemenuhan indikator. Hal inilah yang menyebabkan uji statistik sebelumnya memiliki signifikansi rendah. Akan tetapi, bila kembali dilihat, indikator yang ada di luar negeri sama dengan gabungan dari indikator permukiman kumuh dan rumah tak layak huni di Indonesia. Oleh karena itu, dengan hasil perbandingan ini, diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan indikator dua permasalahan permukiman tersebut, yaitu permukiman kumuh dan rumah tak layak huni.

Untuk lebih memperdalam urgensi integrasi dua permasalahan permukiman tersebut, stakeholder dapat mempertimbangkan pengaruh permasalahan permukiman ini terhadap kota secara keseluruhan. Kondisi awal sebelum permasalahan permukiman kumuh atau rumah tidak layak huni muncul adalah perkembangan kota. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [15]. Urbanisasi yang konsisten meningkat menunjukkan pertukaran posisi dominasi penduduk perdesaan dan penduduk perkotaan. Tahun 1970, penduduk perdesaan masih mendominasi komposisi penduduk, yaitu 80%. Tahun 2010 merupakan titik equilibrium presentase penduduk kota dan penduduk perdesaan. Proyeksi di tahun 2035, penduduk kota di Indonesia akan mencapai 67% persen [16].

Isu urbanisasi, perwujudan kota layak huni dan berkelanjutan adalah dasar dari UN Habitat melakukan konferensi berkala untuk membahas permukiman di dunia. Konferensi terakhir di Equador pada Konferensi Habitat III tahun 2016 yang menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai

pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan[16]. Kesepakatan tersebut adalah deklarasi New Urban Agenda (NUA). Indonesia telah menerjemahkan dan mengadopsi NUA dalam implementasi berbagai program penanganan permukiman (termasuk penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni), antara lain, program KOTAKU, BPS, dan lain-lain [17].

Di Kota Bandar Lampung, perkembangan perkotaan dari kota besar yang mulai meningkat menjadi kota metropolitan, harus diantisipasi dengan keberlanjutan penanganan permasalahan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

Tabel 9. Perkembangan Kota Bandar Lampung dari sisi kependudukan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (eksponensial)	Laju Pertumbuhan Penduduk (geometri)	Kelas Kota
2012	881.801	-	-	Kota Besar
2015	979.287	1,92%	1,94%	Kota Besar
2020	1.068.982	1,65%	1,66%	Metropolitan
2025	1.174.613 (proyeksi)	-	-	Metropolitan
2030	1.290.682 (proyeksi)	-	-	Metropolitan
2035	1.418.221 (proyeksi)	-	-	Metropolitan
	Rata rata laju	1,88%	1,91%	

Sumber : Analisis Peneliti, 2021 [18][19][20]

Tidak ada *blueprint* yang paling tepat untuk mengatasi permukiman kumuh (*slum*). Proses pengentasan permukiman kumuh telah banyak dilakukan di negara india dengan survei yang tidak terhitung lagi untuk mengatasinya. Namun, pekerjaan pengentasan permukiman kumuh ini tidak pernah selesai karena ada proses yang hilang dalam penyelesaian kekumuhan, salah satunya dengan partisipasi masyarakat [21].

Di sisi lain, pola penanganan permasalahan permukiman Indonesia, masih membedakan penanganan permukiman kumuh dan rumah tak layak huni. Melihat temuan studi kasus di Kota Bandar Lampung sebelumnya, terlihat bahwa tidak signifikansi hubungan antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni rendah. Hal ini menggambarkan kondisi yang sama antar Kota Bandar Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Penanganan yang tidak diintegrasikan tersebut

membuat penanganan spesifik indikatornya menjadi dua kali sehingga tidak efektif dan efisien. Dengan studi ini, diharapkan akan ada sinkronisasi penanganan sehingga akan efektif dan efisien dalam mengatasi dua masalah permukiman, yaitu masalah permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

Kesimpulan

Hubungan indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni yang berlaku di Indonesia, jika diteliti dengan studi kasus Kota Bandar Lampung maka memiliki signifikansi yang rendah. Hal ini dikarenakan perbedaan orientasi dari dua kategori tersebut sehingga akan sulit menemukan keterkaitan pemenuhan indikator. Bila dikomparasikan dengan Indikator Rumah Layak Huni beberapa negara lain (Malaysia, Korea, Australia, Kanada, dan Inggris), Indikator tersebut merupakan gabungan dari Indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Indikator penentuan permukiman kumuh dan rumah layak huni dapat diintegrasikan sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan permasalahan permukiman di Indonesia.

Konflik Kepentingan

menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Kepada Program Studi dan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA dan Yosi S. Mutiarni S.T., M. Sc. atas arahannya dalam penulisan jurnal.

Daftar Pustaka

- [1] Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia. *Indonesia Most Livable City Index 2017*. Jakarta
- [2] Puteri, Anita Diyanti dan Hari Basuki Notobroto. "Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehab Rumah tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5, No.2, Desember 2016
- [3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- [4] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- [5] Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 403 tahun 2002 tentang tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
- [6] Ridhoni, Miftahul,dkk. "Penentuan Area-Area Layak Huni di Kota Banjarmasin Berdasarkan Indikator-Indikator Spasial". *The Indonesian Green Technology Journal*, 2019
- [7] Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 406/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung
- [8] Bringolf, Jane, "The Landcom Universal Housing Design Guidelines : Best Practice or wishful thinking?," *The Journal of The Centre Accessible Environments*, Issue 129, pp. 16-18, Autumn 2011.
- [9] Landcom, *Universal Housing Design Guidelines*. Australia : Landcom :2008
- [10] Shin Ae, Jeon and Jaewon Lee. " Households Under Minimum Housing Standard". Dipresentasikan pada 23rd Population Census Conference, Korea, 2007
- [11] *Minimum Housing and Health Standards*. 2013. Canada : Government of Alberta
- [12] *Law of Malaysia : Workers Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990*. 2006. Malaysia : The Commissioner og Law Revision
- [13] *Housing Standards Review*. 2013. United Kingdom : Department for Communities and Local Government.
- [14] Heller, Patrick, "Making Slums Livable", *Sociological Insight fro Development Policy* Vol. 1 no. 5 pp 1-2, 2016
- [15] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [16] Bappenas et al. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta : BPS
- [17] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. *Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan untuk Kota Berkelanjutan di Indonesia*
- [18] Kota Bandar Lampung dalam Angka 2012. Bandar Lampung : Badan Pusat Statistik
- [19] Kota Bandar Lampung dalam Angka 2015. Bandar Lampung : Badan Pusat Statistik
- [20] Kota Bandar Lampung dalam Angka 2020. Bandar Lampung : Badan Pusat Statistik
- [21] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota